

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peranan besar dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional suatu negara. Sektor yang penting dari proses pembangunan nasional negara ialah turut meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia suatu negara melalui pendidikan, yaitu orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi. Jalur Pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.<sup>1</sup> Keberhasilan suatu organisasi bukan hanya ditentukan oleh Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan serta mengendalikan organisasi.

Pendidikan dalam suatu organisasi dapat menciptakan peluang bagi tenaga kerja yang tidak hanya kaya akan pengetahuan teoritis melainkan juga praktis, penguasaan teknologi dan memiliki spesialisasi keahlian secara khusus. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar dalam

---

<sup>1</sup>Kemenag, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, diakses dari <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf> pasal 13 ayat (1), tanggal 9 Desember 2017.

pengevaluasian untuk peningkatan pendidikan di setiap negara secara berkesinambungan.

Secara garis besar sumber daya manusia berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Melihat pentingnya sumber daya manusia bagi sebuah institusi maupun perusahaan, kehadiran pendidikan non formal dapat dipandang sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kehadiran pendidikan non formal disebabkan oleh adanya kebutuhan pendidikan yang luas terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang begitu besar dan cepat maka munculah sistem pendidikan alternatif di luar pendidikan formal.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan non formal diartikan sebagai jalur pendidikan, di luar jalur pendidikan formal, yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.<sup>2</sup> Pada pasal 26 ayat (3) dijelaskan pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan

---

<sup>2</sup>Djudju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 313

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.<sup>3</sup>

Kehadiran pendidikan non formal dinilai sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia. Struktur program yang lebih luas dan fleksibel, biaya lebih murah, lebih berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta dapat tersalurkan menjadi tenaga kerja terampil yang dibutuhkan setiap instansi atau perusahaan.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi.<sup>4</sup> Faktor produksi tenaga kerja (labor) merupakan faktor produksi yang tidak kalah penting dengan faktor produksi lain. Faktor produksi tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja jasmani atau tenaga kerja kasar (contohnya tukang, buruh angkut, kuli pelabuhan, buruh bangunan, dan lain-lain) dan tenaga kerja rohani atau tenaga kerja professional (contohnya guru, instruktur, dosen, dokter, direktur, menteri dan lain-lain).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2) dijelaskan tenaga kerja

---

<sup>3</sup> Kemenag, *op.cit*, pasal 26 ayat (3) diakses tanggal 10 Desember 2017.

<sup>4</sup> Alam. S, *eBook Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas X*, diakses dari [https://books.google.co.id/books?id=TCWOsZuC8IkC&pg=PT57&dq=tenaga+kerja+menurut+para+ahli&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjOquOv9\\_7XAhXEu48KHbHPAvgQ6AEINTAD#v=onepage&q=tenaga%20kerja%20menurut%20para%20ahli&f=false](https://books.google.co.id/books?id=TCWOsZuC8IkC&pg=PT57&dq=tenaga+kerja+menurut+para+ahli&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjOquOv9_7XAhXEu48KHbHPAvgQ6AEINTAD#v=onepage&q=tenaga%20kerja%20menurut%20para%20ahli&f=false), tanggal 10 Desember 2017.

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>5</sup>

Di Negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan tenaga kerja terampil sudah mencapai angka 113 juta pada tahun 2030. Hal ini berdasarkan hasil riset McKinsley Global Institute (MGI) yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 di mana Indonesia memiliki potensi menjadi Negara ekonomi ke-7 terbesar di dunia pada tahun 2030 mendatang.<sup>6</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik memastikan jumlah pengangguran di Indonesia sampai Agustus 2017 mencapai 7,04 juta orang dari 128,06 juta orang angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja ini bertambah 2,62 juta orang dibanding Agustus tahun lalu yang sebanyak 125,44 juta orang yang mengalami peningkatan sekitar 10.000 orang dari Agustus tahun lalu. Meski demikian, secara presentase angka tingkat pengangguran turun di mana pada Agustus tahun lalu mencapai 5,61% dan pada Agustus 2017 menjadi 5,50%.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Kemenperin, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, diakses dari [http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU\\_13\\_2003.pdf](http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf) pasal 1 ayat (2), tanggal 10 Desember 2017.

<sup>6</sup> Liputan 6, *Menaker: Indonesia Butuh 113 Juta Tenaga Kerja Terampil*, diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2925333/menaker-indonesia-butuh-113-juta-tenaga-kerja-terampil>, tanggal 10 Desember 2017.

<sup>7</sup> Detik Finance, *Pengangguran di RI Bertambah 10.000 Jadi 7,04 Juta Orang*, diakses dari

Sementara di Ibukota DKI Jakarta sendiri menurut Kepala Badan Pusat Statistik DKI Jakarta Thoman Pardosi, mengatakan secara rata-rata penurunan angka pengangguran di Jakarta selama kurun waktu lima tahun mencapai 1,05 persen per tahun.<sup>8</sup> Di satu sisi, hasil riset Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan yang diolah dari data BPS pada tahun 2015 menunjukkan jumlah tenaga kerja terampil yang dimiliki Indonesia saat ini baru 57 juta orang.<sup>9</sup> Selain kekurangan tenaga kerja terampil persoalan lain adalah kondisi angkatan kerja Indonesia yang didominasi lulusan SLTA ke bawah juga mismatch keterampilan antara pekerjaan dengan latar belakang pendidikan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 9 dijelaskan pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.<sup>10</sup>

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan program

---

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3715236/pengangguran-di-ri-bertambah-10000-jadi-704-juta-orang>, tanggal 10 Desember 2017.

<sup>8</sup> Kompas, *BPS DKI: Jumlah Pengangguran di Jakarta Berkurang*, diakses dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/05/21003771/bps.dki.jumlah.pengangguran.di.jakarta.berkurang>, tanggal 10 Desember 2017.

<sup>9</sup> Liputan 6, *op.cit*, *Menaker: Indonesia Butuh 113 Juta Tenaga Kerja Terampil*, diakses tanggal 10 Desember 2017.

<sup>10</sup> Kemenperin, *op cit*, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, diakses tanggal 10 Desember 2017.

pelatihan kerja. Rothwell dan Sredl menyatakan bahwa *“training is a shortterm learning intervention. It is intended to build on individual knowledge, skills, and attitudes to meet present or future work requirements”*.<sup>11</sup> Artinya, pelatihan adalah intervensi pembelajaran jangka pendek, yang ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memenuhi persyaratan pekerjaan saat ini dan yang akan datang.

Pelatihan kerja tersebut diakomodir dalam Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD). Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2002 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta disebut Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) yang tugas utamanya adalah melaksanakan pelatihan di berbagai jurusan.

Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Daerah nomenklatur Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) berubah menjadi Pusat Pelatihan Kerja Daerah

---

<sup>11</sup> William J. Rothwell dan Henry J. Sredl, *Competency-Based Human Resource Management* (California: Davies-Black Publishing, 2004), h. 9.

(PPKD). Kemudian diperbaharui lagi dengan dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 341 Tahun 2016 yang dipakai hingga saat ini.

Pemberdayaan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) merupakan salah satu instrument pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang produktif sehingga nantinya mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten dan memenuhi permintaan pasar tenaga kerja dengan berbagai kurikulum dan program yang ada di PPKD. Dengan begitu, seiring dengan perkembangan zaman dan terus bertambahnya penduduk, maka kualitas dan target keberhasilan perlu ditingkatkan. PPKD berada pada 5 (lima) wilayah DKI Jakarta yaitu PPKD Jakarta Timur, PPKD Jakarta Pusat, PPKD Jakarta Utara, PPKD Jakarta Barat, dan PPKD Jakarta Selatan.

PPKD Jakarta Selatan menjadi pelopor dari penggunaan teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga berbasis android yang dapat diunduh oleh semua lapisan masyarakat yang ingin mengetahui dan mengikuti program pelatihan di PPKD Jakarta Selatan. Fasilitas yang disediakan sangat beragam seperti, pelatihan yang gratis, makan siang, bahan praktikum, sertifikat kelulusan PPKD Jakarta Selatan, sertifikat uji kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk pelatihan regular, dan bursa kerja di akhir pelatihan. Jenis pelatihan kerja yang diselenggarakan di PPKD Jakarta Selatan terdiri dari Pelatihan

MTU (*Mobile Training Unit*) dan sebelas kejuruan regular yaitu: Teknik Otomotif, Teknik Sepeda Motor, Teknik Pendingin, Teknik Komputer, Bahasa Jepang, Bahasa Inggris, Tata Boga, Tata Busana, Tata Graha, Design Grafis, dan Operator Komputer.

Sesuai dengan tuntutan zaman saat ini yang mengharuskan semua sumber daya manusia menguasai komputer, baik dari perangkat lunak maupun perangkat keras komputer, maka Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer menjadi salah satu kejuruan unggulan di PPKD Jakarta Selatan dan kejuruan yang banyak diminati oleh masyarakat. Selain itu, program pelatihan ini telah terakreditasi dan telah memiliki instruktur PNS yang dibantu oleh dua instruktur non PNS. Pada kejuruan operator komputer materi yang diajarkan adalah seputar *Office Tool* (operator komputer) terutama pada program *Microsoft Office* serta kecepatan mengetik dengan menggunakan sepuluh jari, karena keahlian ini sangat banyak dibutuhkan dalam dunia kerja. Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan memberikan fasilitas komputer dengan program dan peralatan *terupdate* yang dapat digunakan oleh setiap peserta pelatihan.

. Peserta pelatihan operator komputer akan mengikuti serangkaian pelatihan dengan silabus yang telah dibuat oleh instruktur operator komputer PPKD Jakarta Selatan bersama dengan instruktur operator komputer PPKD Jakarta lainnya didampingi pula oleh Dinas Tenaga Kerja



dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Silabus dibuat untuk waktu pelatihan selama 45 hari atau selama 360 jam pelajaran dengan lima kali pertemuan setiap minggu. Unit kompetensi pada program pelatihan kejuruan operator komputer adalah (1) menggunakan *keyboard* komputer, (2) mengoperasikan printer, (3) mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata, (4) mengoperasikan perangkat lunak angka, (5) mengoperasikan perangkat lunak presentasi, (6) mengoperasikan penelusur web (*web browser*), (7) mengoperasikan perangkat lunak Klien E Mail (*E-Mail Client*), (8) mempergunakan perangkat lunak anti virus, (9) mempergunakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memindai dokumen dan gambar. Peserta pelatihan harus menguasai semua kompetensi yang diajarkan pada jangka waktu yang relatif singkat. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 orang/angkatan.

Jumlah peserta yang banyak harus diimbangi dengan komputer dan internet yang cukup dan memadai. Peralatan komputer dan jaringan internet harus ada karena pada pelatihan operator komputer akan lebih banyak mempraktikkan cara mengelola dan mengoperasikan komputer. Instruktur dan peserta pelatihan operator komputer harus mengoptimalkan pemakaian peralatan dengan semua bahan praktik yang ada agar peserta lulusan pelatihan memiliki keterampilan khusus. Pemakaian peralatan praktik secara optimal juga mengharapkan peserta mampu lulus dengan hasil uji kompetensi yang baik.

Uji kompetensi akhir dilaksanakan pada akhir pertemuan selama dua jam. Uji kompetensi akhir memiliki peran penting untuk menyatakan peserta pelatihan kompeten dan mendapatkan sertifikat kelulusan. Hasil uji kompetensi akan dijadikan laporan akhir pelatihan dan data peserta akan dimasukkan untuk dikeluarkan sertifikat pelatihan operator komputer. Bukan hanya itu, peserta juga akan mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) apabila dinyatakan kompeten. Sertifikat dan ilmu pelatihan akan berguna sebagai bukti keterampilan ketika peserta mendaftar kerja di industri/perusahaan atau membuka usaha mandiri setelah peserta lulus pelatihan.

Peserta lulusan pelatihan operator komputer di PPKD Jakarta Selatan diharapkan mampu bersaing di dunia usaha maupun di dunia industri. Persaingan dunia usaha dan dunia industri yang ketat, menyebabkan peserta lulusan pelatihan operator komputer harus bekerja keras dalam menghadapi persaingan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugihartono selaku Kepala Tata Usaha di PPKD Jakarta Selatan dari Peneliti melakukan *grandtour* di PPKD Jakarta Selatan yang beralamat di Jl. Buncit Raya No. 440, RT. 03, RW. 05, Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini PPKD Jakarta Selatan belum mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan pengangguran di DKI Jakarta khususnya di Jakarta Selatan.

Hal ini dikarenakan peserta pelatihan yang telah dinyatakan lulus dari PPKD Jakarta Selatan ternyata belum sepenuhnya memenuhi tujuan dari pelatihan tersebut yaitu dapat bersaing di dunia kerja. Karena pada kenyataannya setelah lulus dari pelatihan kemudian mulai memasuki dunia kerja, dalam jangka waktu beberapa minggu maka peserta pelatihan yang dinyatakan lulus itu memilih keluar dari tempat pekerjaannya dengan berbagai macam alasan. Seperti jarak yang ditempuh untuk bekerja terlalu jauh, budaya organisasi kerja yang kurang sesuai, atau tidak sesuai dengan keinginannya, dan lain sebagainya.

Permasalahan ini ternyata juga terjadi pada Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer selain kurangnya mental kerja pada peserta pelatihan, menurut data yang diberikan oleh Kasatpel Pemasaran PPKD Jakarta Selatan yaitu Bapak Amien Fauzi S.Pd.I jumlah angka lulusan peserta Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer tahun 2017 yang belum bekerja lebih banyak dari pada yang sudah bekerja. Padahal menurut Bapak Amien Fauzi S.Pd.I Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer sudah disisipkan sedikit materi akuntansi dan wirausaha mandiri untuk lebih menunjang keahliannya dalam dunia kerja.

Berdasarkan hal di atas, peneliti menetapkan pilihan bahwa PPKD Jakarta Selatan ini layak dijadikan tempat penelitian untuk memperoleh data dan informasi lebih lanjut mengenai proses pengevaluasian program pelatihan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan judul “**Evaluasi Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan**”.

## **B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Dengan melihat latar belakang penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap evaluasi Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan. Adapun sub fokus dalam penelitian sebagai berikut:

1. *Context* Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer.
2. *Input* Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer
3. *Process* Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer
4. *Product* Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan focus penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi *Context* Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan?
2. Bagaimana evaluasi *Input* Pelatihan Kejuruan Operator Komputer di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan?

3. Bagaimana evaluasi *Process* Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan?
4. Bagaimana evaluasi *Product* Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menilai:

1. Gambaran permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang, tujuan dan analisis kebutuhan Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer
2. Kesesuaian sumber daya manusia, sasaran, sarana dan prasarana pendukung Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer
3. Efektivitas dan kesesuaian persiapan, pembekalan, menjalankan usaha, pemantauan dan evaluasi.
4. Kesesuaian hasil dan pelaporan Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis dan kegunaan teoritis yang diuraikan di bawah ini:

### **1. Secara praktis**

Dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, sehingga tujuan dari Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) dapat tercapai secara lebih menyeluruh.

### **2. Secara teoritis**

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan referensi tentang Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer.
- b. Mengembangkan pengetahuan peneliti tentang solusi dan permasalahan Program Pelatihan Kejuruan Operator Komputer.